

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Kota Kupang

Nama Kupang sebenarnya berasal dari nama seorang Raja yaitu Nai Kopan atau Lai Kopan, yang memerintah Kota Kupang sebelum bangsa Portugis datang ke Nusa Tenggara Timur.

Nama Lai Kopan kemudian disebut oleh Belanda sebagai Koepan dan Belanda membentuk daerah penyangga di daerah sekitar teluk Kupang dengan mendatangkan penduduk dari pulau Rote, Sabu dan Solor. Untuk meningkatkan pengaman Kota, maka pada tanggal 23 April 1886, Residen Creeve menetapkan batas-batas Kota yang diterangkan pada *staatblad* nomor 171 tahun 1886. Oleh karena itu, tanggal 23 April 1886 ditetapkan sebagai tanggal lahir Kota Kupang.

Setelah Indonesia merdeka, melalui surat keputusan Gubernur tanggal 16 Februari 1946, Kota Kupang diserahkan kepada Swapraja Kupang, yang kemudian dialihkan lagi statusnya pada 21 Oktober 1946 dengan Entuk Timor Eiland Federatie atau Dewan Raja-raja Timor dengan ketua H.A.A. Koroh yang juga adalah raja Amarasi.

Berdasarkan surat Swapraja Kupang Nomor 3 tahun 1946 tanggal 31 Mei 1946 dibentuk Raad Sementara Kupang dengan 30 anggota. Selanjutnya pada tahun 1949, Kota Kupang memperoleh status Haminte dengan Wali Kota pertamanya Th. J. Messakh. Pada tahun 1955 ketika menjelang Pemilu, dengan

surat keputusan Mendagri Nomor PUD.5/16/46 tertanggal 22 Oktober 1955, Kota Kupang disamakan statusnya dengan Wilayah kecamatan.

Pada Tahun 1958 dengan undang-undang nomor 64 Tahun 1958, provinsi Sunda kecil dihapus dan dibentuk 3 Daerah swantara, yaitu daerah swantara Tk 1 Bali, Daerah Tk 1 Nusa Tenggara Barat, dan Daerah Swantara Tk 1 Nusa Tenggara Timur. Kemudian undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II (Kabupaten) yang antara lain Kabupaten Kupang. Dengan surat keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 1969 tanggal 12 Mei 1969 dibentuk wilayah kecamatan yakni Kecamatan Kota Kupang.

Kecamatan Kota Kupang mengalami perkembangan pesat dari tahun ke tahun. Kemudian pada tahun 1978 kecamatan Kota Kupang ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1978, yang peresmianya dilakukan pada tanggal 18 september 1978. Pada waktu itu Drs. Mesakh Amalo dilantik menjadi Wali Kota Administratif yang pertama dan kemudian diganti oleh Letkol inf. Samuel Kristian Lerik pada tanggal 26 Mei 1986 sampai dengan perubahan status menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

Usulan Rakyat dan Pemerintah Kota Administratif Kupang untuk mengubah status menjadi daerah Kotamadya Tingkat II Kupang disetujui oleh DPR RI dengan disahkannya Rancangan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang menjadi Undang-Undang pada tanggal 20 Maret 1996 dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia

dan tertuang pada lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632 Tahun 1996. Pembentukan Kotamadya daerah Tingkat II Kupang diresmikan oleh Mendagri Mohammad Yogi S. M. pada tanggal 25 April 1996.

Kemudian dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, maka Kotamadya daerah Tingkat II Kupang berubah menjadi Kota Kupang.¹

4.2. Deskripsi Umum Wilayah Kota Kupang

Kota Kupang adalah sebuah Kotamadya sekaligus sebagai ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kotamadya ini adalah kota yang terbesar di pulau Timor yang terletak di pesisir teluk Kupang, bagian dari Pulau Timor. Sebagai Kota terbesar di provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang dipenuhi oleh berbagai suku bangsa. Suku yang signifikan jumlahnya di Kota Kupang adalah suku Timor, Rote, Sabu, Tionghoa, Flores dan sebagian kecil pendatang dari Jawa dan Bugis.

Letak wilayah Kota Kupang terletak pada 10°36'14"-10°39'58" LS dan 123°32'23"-123°37'01" BT. Sedangkan luas wilayah kota kupang adalah 180,27 Km². Dengan peruntukan kawasan Industri 735,57 Ha, Permukiman 10.127,40 Ha, Jalur Hijau 5.090,05 Ha, Perdagangan, 219, 70 Ha, Pergudangan 112,50 Ha, Pertambangan 480 Ha, Pelabuhan Laut/Udara 670,1 Ha, Pendidikan 275,67 Ha, Pemerintahan/perkantoran 209,47 Ha, lain-lain 106,54 Ha. Berdasarkan wilayahnya, batas-batas Kota Kupang adalah, Timur: berbatasan dengan kecamatan Kupang Tengah dan Taebenu Kabupaten Kupang, Barat: Kecamatan

¹ Sumber: Wikipedia, Diakses pada tanggal 5 maret 2017

Kupang Barat dan Selat Semau, Utara: Teluk Kupang, dan Selatan Kecamatan Kupang Barat dan Nekamese.²

4.2.1. Keadaan Penduduk

a. Jumlah Penduduk

berdasarkan data badan pusat statistik, penduduk Kota Kupang Tahun 2016 berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2010 Berjumlah 402.129 jiwa yang terbagi atas 206.129 jiwa laki-laki dan 196.157 jiwa perempuan. Rasio jenis kelamin tahun 2016 adalah 105 yang berarti dari 100 perempuan terdapat 105 laki-laki.

Kepadatan jumlah penduduk di Kota Kupang sebanyak 2.231,57 jiwa per km². Kecamatan dengan kepadatan penduduk yang paling tinggi adalah Kecamatan Kota Lama dengan kepadatan 10.632,92 jiwa per km². Sementara itu jumlah Rumah Tangga di Kota Kupang tahun 2016 adalah 95.258 rumah tangga.³

b. Pendidikan

Kota Kupang memiliki sarana Pendidikan milik pemerintah dan yang dikelola oleh swasta untuk pendidikan formal dan informal dari tingkat PAUD, PlayGroup, TK, SD, SLTP, dan SLTA serta perguruan tinggi

² Sumber: BPS Kota Kupang Tahun 2017

³ Sumber: BPS Kota Kupang Tahun 2017

Table 1

Jumlah sekolah yang ada di Kota Kupang dari TK hingga Perguruan Tinggi⁴

NO	Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar	132
2	Sekolah Menengah Pertama	50
3	Sekolah Menengah Atas	58
4	Perguruan Tinggi	24

a. Kesehatan

Kota Kupang memiliki sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta dari rumah sakit yang ada di Kota Kupang semuanya berjumlah 11 unit yang terbagi dalam 5 Rumah Sakit Pemerintah dan 6 Rumah Sakit Swasta.⁵

b. Agama

Masyarakat Kota Kupang pada umumnya menganut agama Kristen protestan karena karena hampir semua masyarakat asli yang merupakan penduduk asli Kota Kupang beragama Kristen

⁴ Sumber: BPS Kota Kupang Tahun 2017

⁵ Sumber: BPS Kota Kupang Tahun 2017

protestan. Namun selain itu adapun agama-agama lain yang juga menetap di Kota Kupang seperti, Katolik, Islam, Hindu, Budha dan lainnya.

Table 2

Jumlah penduduk menurut Kecamatan dan Agama yang dianut di Kota Kupang, 2016⁶

No	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu dan Lainnya
1	Alak	18.937	52.191	7.079	400	17	6
2	Maulafa	8.230	66.179	24.308	715	50	4
3	Oebobo	17.440	61.897	38.208	1225	57	9
4	Kota Raja	10.505	52.399	10.179	643	17	0
5	Kelapa Lima	12.880	49.781	19.688	495	27	6
6	Kota Lama	15.745	23.259	10.534	533	87	3
Kota Kupang		83.737	305.706	109.996	4.041	255	28

⁶BPS Kota Kupang Tahun 2017

4.3. Kondisi Pemerintahan Kota Kupang

Kota Kupang Dipimpin oleh seorang Walikota dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Walikota dibantu oleh seorang Wakil Walikota yang dipilih melalui suatu pemilihan umum pada setiap 5 tahun. Kota Kupang memiliki perangkat daerah yaitu 18 dinas, 8 badan, 3 kantor dan 8 bagian. Disamping itu terdapat Instansi vertikal, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Agama. Wilayah pemerintahan Walikota Kupang meliputi 6 daerah kecamatan.

4.4. Deskripsi Obyek Penelitian

Adapun obyek penelitian yang diteliti yaitu tentang peran KPA Kota Kupang Dalam Menanggulangi Penyebaran Penyakit HIV/AIDS di Kota Kupang Tahun 2016.

KPA Kota Kupang merupakan suatu badan koordinator dalam menangani penyebaran HIV/AIDS Di Kota Kupang, tugas dari KPA yaitu melakukan rapat koordinasi dengan seluruh mitra kerja serta instansi terkait untuk membahas mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi penyebaran HIV/AIDS. Kegiatan yang dimaksud yaitu melakukan Mobile VCT dan Sosialisasi terhadap semua lapisan masyarakat baik di lingkungan kelurahan, sekolah-sekolah serta dapat dilakukan juga di kantor. Selain itu KPA juga melakukan sebuah kegiatan yakni pelatihan bagi para pendidik sebaya untuk menjadi pendamping bagi para ODHA, tujuannya agar melakukan pendampingan terhadap para ODHA agar mereka dapat mengembangkan minat

dan bakat yang ada dalam diri mereka agar mereka tidak terjerumus dalam pikiran yang menyesatkan.

a. Penderita HIV/AIDS di Kota Kupang

Sebanyak 166 anak usia 15-25 tahun di Kota Kupang telah terinfeksi Virus HIV/AIDS dalam kurun waktu tahun 2000-2016. Mereka terinfeksi melalui hubungan seks beresiko 99 persen dan sisanya 1 persen karena jarum suntik. Total warga di Kupang yang terinfeksi virus HIV/AIDS sebanyak 1.015 orang.

Sementara itu 26 lain adalah mereka yang berusia 0-4 tahun, dan usia 5-9 tahun ada 3 orang, sedangkan usia 25-49 tahun ada 760 orang, dan 60 orang lainnya berusia diatas 50 tahun. Dari semua penderita terbagi dalam 708 penderita HIV dan sebanyak 307 yang sudah mencapai AIDS. Dan penyebarannya pun merata di 6 Kecamatan yang ada di Kota Kupang dengan urutan Maulafa, Alak, Oeobo, Kota Lama, Kota Raja, dan Kelapa Lima.

Untuk menekan penularan HIV/AIDS sejak tahun 2014 telah dibentuk Warga Peduli AIDS (WPA) di 51 Kelurahan. Pihak Dinkes dengan KPAD bekerja sama dengan WPA mendatangi masyarakat di setiap Kelurahan dengan VCT

Mobile untuk memberikan Sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk tes HIV/AIDS.⁷

4.4.1. Visi dan Misi KPA Kota Kupang

VISI : MEWUJUDKAN KOTA KUPANG SEBAGAI KOTA BERBUDAYA MODERN, PRODUKTIF DAN NYAMAN BERKELANJUTAN

MISI:

- Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat Kota Kupang tentang kesehatan reproduksi remaja, IMS, HIV, dan AIDS serta NARKOBA
- Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyebaran dan penularan IMS, HIV, dan AIDS serta NARKOBA untuk seluruh masyarakat Kota Kupang
- Meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan kesehatan dalam penanggulangan IMS, HIV, dan AIDS serta NARKOBA
- Meningkatkan kerja sama dan komitmen ndalam upaya pencegahan dan penanggulangan IMS, HIV dan AIDS
- Melakukan perawatan dan pengobatan terhadap pasien IMS, HIV dan AIDS

1. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemutusan mata rantai IMS

⁷ KPA Kota Kupang Tahun 2017

2. Mengupayakan kebijakan dan perawatan tentang pencegahan dan penanggulangan IMS, HIV dan AIDS Di wilayah Kota Kupang.

4.4.2.Dasar Hukum KPA Kota Kupang

Komisi Penanggulangan AIDS atau disingkat KPA, dibentuk pada 33 provinsi, kota dan kabupaten di Indonesia. Tujuan pembentukan KPA adalah sebagai wadah koordinasi antar lembaga pemerintahan dan lembaga swadaya masyarakat serta semua sector terkait. Beberapa aturan yang mendasari terbentuknya KPA sebagai berikut:

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006, tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007, tentang pedoman umum pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS Di Daerah
- c. Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat RI No. 02 Tahun 2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS melalui pengurangan dampak buruk penggunaan Narkotika psikotropika dan Zat Adiktif Suntik.
- d. Peraturan menko Kesra No.07/PER/MENKO/KESRA/ III/2007 tentang strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS 20072010.

- e. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS
- f. Keputusan Walikota Kupang Nomor 32/KEP/HK/2014 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Tahun Anggaran 2014
- g. Perwali Nomor 1 tahun 2013 tentang ppenetapan orang dengan HIV dan AIDS di Kota Kupang.
- h. Perwali Nomor 2 Tahun 2013 Tentangg Tata Cara Pemberian dan Besarnya Nilai Insentif dan Disinsentif kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam program pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS
- i. Perwali Nomor 3 Tahun 2013 tentang syarat dan tatacara pemerian ijin penanganan HIV dan AIDS oleh masyarakat dan pelaku usaha di Kota Kupang.
- j. Perwali Nomor 4 Tahun 2013 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Kota Kupang
 - a. Susunan Organisasi dan Tata Usaha Komisi Penanggulangan AIDS Kota Kupang

4.5. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Komisi Penanggulangan AIDS Kota Kupang

- a. Ketua
- b. Ketua Harian, terdiri dari
 - 1. Wakil Ketua I
 - 2. Wakil Ketua II
- c. Sekretaris, terdiri dari

1. Internal
 - a. Pengelola Program
 - b. Pengelola Monev
 - c. Pengelola Administrasi
 - d. Pengelola Keuangan
 - e. Pengelola Logistik
2. Eksternal
 - a. Instansi Terkait
 - b. Mitra Kerja
3. Pokja
 - a. Pokja VCT dan CST
 - b. Pokja Media
 - c. Pokja PMTS atau Lokasi
 - d. Pokja Harm Reduction

1. Tugas-tugas

Komisi penanggulangan AIDS kota memiliki tugas merumuskan kebijakan strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan AIDS di wilayahnya seperti melakukan berbagai macam kegiatan dalam rangka menanggulangi penyebaran HIV/AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh komisi AIDS Nasional. Komisi penanggulangan AIDS kota melaporkan secara berkala pelaksanaan tugasnya kepada ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Ketentuan mengenai tata kerja KPA

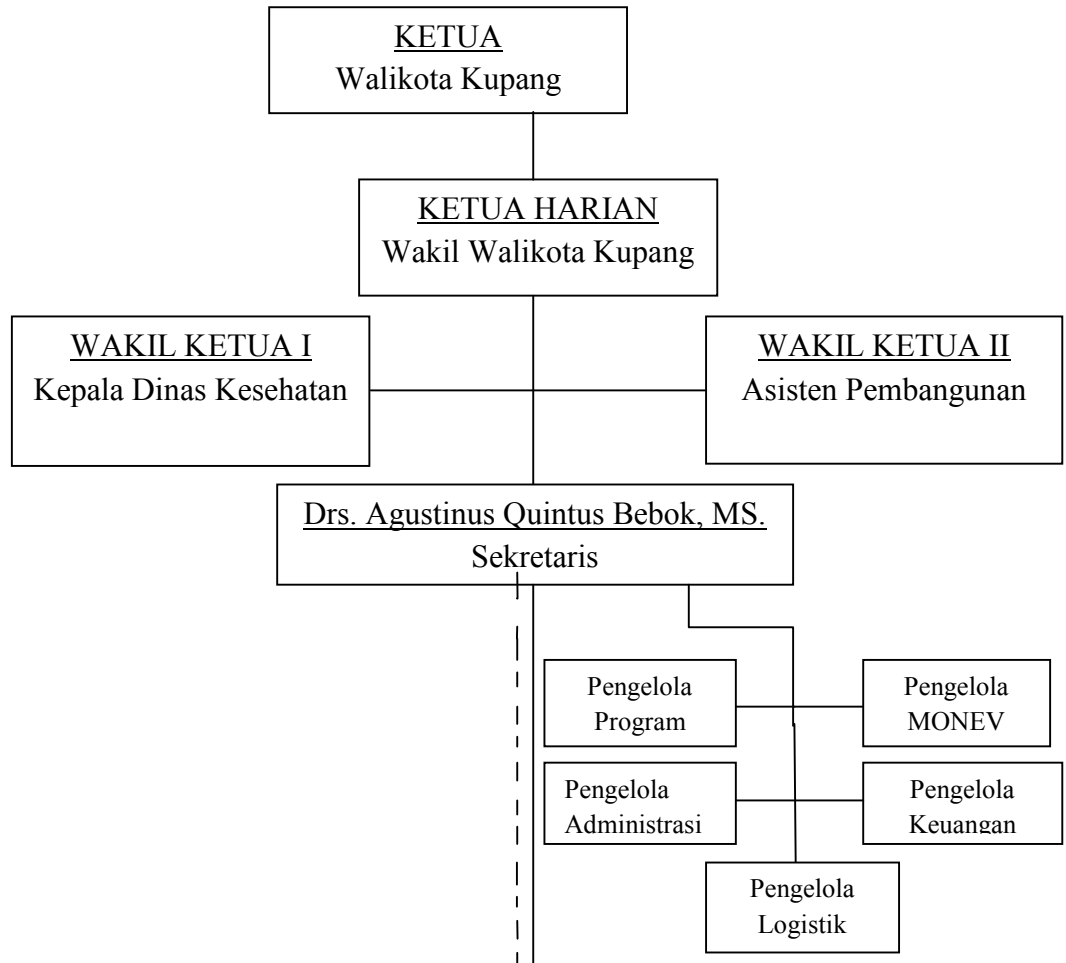
Kota diatur oleh walikota dengan berpedoman pada tata kerja yang ditetapkan oleh ketua KPA Nasional.

- a. Sekertaris memiliki tugas pokok yaitu memimpin KPA Kota dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tata kerja yang ditetapkan oleh KPA Nasional. Misalnya memimpin rapat koordinasi dengan para mitra kerja dan instansi terkait..
- b. Pengelola program memiliki tugas sebagai merancang segala program dalam KPA yang berkaitan dengan penanganan HIV/AIDS yang kemudian dijalankan secara bersama-sama.
- c. Tugas pengelola monev yaitu membantu pengelola program dalam melaksanakan perencanaan program kegiatan dalam melaksanakan rencana kegiatan yang sudah dibuat, kemudian membantu meningkatkan kualitas hasil capaian.
- d. Pengelola Administrasi memiliki tugas yaitu, menyediakan, melengkapai serta mengelola buku-buku administrasi organisasi dengan baik dan teratur serta mencatat alat-alat perlengkapan organisasi dan kegiatan-kegiatan kedalam buku Administrasi.
- e. Pengelola Keuangan memiliki tugas yaitu, yaitu melakukan kegiatan penatausahaan dokumen pelaksanaan dan realisasi pembayaran, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan peraturan yang ada.
- f. Pengelola Logistik memiliki tugas yaitu, merencanakan dan menentukan kebutuhan pengadaan, penyimpanan penyaluran dan pemeliharaan serta penghapusan material atau alat-alat.

- g. Coordinator Wilayah memiliki tugas yaitu, menkoordinasikan wilayah yang akan menjai tempat dilaukanya kegiatan dengan baik untuk memastikan suatu kegiatan dapat dilaksanakan di tempat yang benar.
- h. Tugas Koordinator penjangkauan yaitu, adalah menjamin kelancaran kegiatan penjangkauan yang dilakukan oleh petugas laangan serta memerikan laporan secara berkala kepada coordinator.

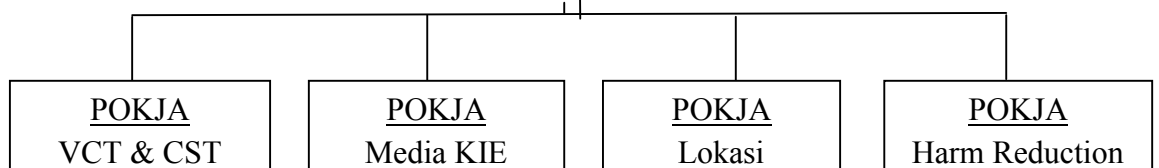
4.6. Struktur Organisasi KPA Kota Kupang

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KOTA KUPANG⁸



Anggota-anggota

Kepala Bappeda Kota Kupang, Kapolresta Kupang, Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Kupang, Kepala Badan KB dan KS Kota Kupang, Kepala Dinas Kominfo Kota Kupang, Kepala Dinas PPO Kota Kupang, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kupang, Kepala Dinas Nakertrans Kota Kupang, Kepala SATPOL PP Kota Kupang, Kepala BNK Kota Kupang, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kupang, Kepala bagian Sosial SETDA Kota Kupang, Kabag Hukum SETDA Kota Kupang, Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan SETDA Kota Kupang, Kabag Umum dan Perlengkapan SETDA Kota Kupang, Ketua BangKIT, Ketua Flobamora Support, Ketua YTB, Ketua JOTHI, PKBI Kota Kupang, LSM Perjuangan., LSM MENSA, KDS SEHATI, IMoF, FKW,



⁸ Data KPA Kota Kupang Tahun 2017

B.KEPEGAWAIAN

Deskripsi tentang keadaan pegawai atau aparatur pemerintah bermaksud melihat kemampuan sumber daya manusia pada kantor sekretariat daerah yang merupakan pelaku utama tugas sekretariat daerah. Aspek sumber daya manusia dalam dalam organisasi ditinjau dari dua segi yaitu segi kualitas dan kuantitas. Segi kuantitas menunjukkan keseimbangan jumlah pegawai dengan beban tugas, sedangkan segi kualitas menunjukkan kemampuan pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan pegawai dalam menjalankan tugas.

1. Pendidikan Formal Pegawai

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting terwujudnya pelaksanaan tugas-tugas pegawai sesuai dengan tujuan organisasi. Semakin tinggi tingkat pendidikan pegawai, maka semakin berhasil tujuan organisasi. Untuk mengetahui tingkat pendidikan pegawai KPA Kota Kupang, dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 3 ;

Tingkat pendidikan Staf KPA Kota Kupang menurut bagian⁹

No	Bagian	Pendidikan				Jumlah
		Sarjana	SLTA	SLTP	SD	
1	Sekretaris	1				1
2	Bagian Keuangan	1				1
3	Bagian pengelola Program	1				1
4	Bagian Pengelola Monev	1				1
5	Bagian Administrasi	1				1
6	Bagian Logistik		1			1
7	Koordinator Wilayah	3				3
8	Petugas Penjangkauan	1	1			2
9	Staf Dukungan Umum		1			1

⁹ Data KPA Kota Kupang 2017